

Jurnal Riset Ilmiah

<https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI>
E-ISSN 3031-3947

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PERENCANAAN ANGGARAN, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU)

Yolanda Rahmadhani¹, Muhammad Ahyaruddin², Siti Samsiah³

^{1,2,3}Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau

Email: yolandarahmadhani@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 14-07-2024

Revised : 23-08-2024

Accepted : 25-08-2024

Kata Kunci: Sistem pelaporan, Organisasi, Anggaran

DOI:10.62335

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of budget target clarity, budget planning, and reporting systems on performance accountability (empirical study on Regional Apparatus Organizations in Pekanbaru City). This type of research is quantitative research. This research was conducted at Regional Apparatus Organizations (OPD) in Pekanbaru City. The research was conducted from July to August 2024. The population in this study were all employees at the Pekanbaru City OPD totaling 1,354 people. The sampling technique used in this study was purposive sampling and a sample of 47 respondents was obtained. Data sources were primary data sources from questionnaires and secondary data sources from books and journals. The data collection technique used a questionnaire. Data analysis used multiple linear regression analysis methods with performance accountability as the dependent variable and three independent variables of budget target clarity, budget planning, and reporting systems. The results of this study state that the budget target clarity variable has a positive effect on performance accountability. Budget planning has a positive effect on performance accountability. The reporting system has a positive effect on performance accountability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, perencanaan anggaran, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja (studi empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kota Pekanbaru. Waktu

penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2024. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pada OPD Kota Pekanbaru yang berjumlah 1.354 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 47 responden. Sumber data berupa sumber data primer dari kuesioner dan sumber data sekunder dari buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan akuntabilitas kinerja sebagai variabel dependen dan tiga variabel independen kejelasan sasaran anggaran, perencanaan anggaran, dan sistem pelaporan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara variabel. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Rusdiana & Nasihudin, 2021).

Secara umum akuntabilitas kinerja di Indonesia belum sesuai yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2022, Kementerian PANRB melakukan kegiatan evaluasi pada periode Juli hingga November. Untuk hasil evaluasi RB, terdapat 3 pemerintah provinsi dan 2 pemerintah kabupaten/kota meraih predikat A. Sedangkan, sebanyak 22 instansi pemerintah mendapat predikat BB. Pada evaluasi SAKIP, sebanyak 1 pemerintah provinsi berhasil meraih predikat AA. Diikuti dengan 20 instansi pemerintah berpredikat A dan 72 instansi pemerintah mendapatkan predikat BB (Kementerian PANRB, 2022). Satu provinsi yang berhasil meraih predikat AA adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DIY 2022 kembali meraih predikat AA, dan terhitung sudah menjadi yang kelima kalinya berturut-turut tertinggi di Indonesia, sejak tahun 2018 lalu. Selain SAKIP, Reformasi Birokrasi DIY meraih predikat A, mempertahankan predikat yang sama pada tahun-tahun sebelumnya (Jogjaprov.go.id, 2022).

Fenomena akuntabilitas kinerja OPD Kota pekanbaru dapat dilihat dari nilai SAKIP Kota Pekanbaru. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, di mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem

akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaianya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berikut adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022.

**Tabel 1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Poin SAKIP	Predikat
1	2018	54	CC
2	2019	58	CC
3	2020	58	CC
4	2021	60	B
5	2022	60	B

Sumber: Pekanbaru.go.id, 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa penilaian SAKIP Kota Pekanbaru pada tahun 2018-2022 masih kurang optimal karena masih jauh dari target yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Pada tahun 2022 nilai SAKIP mendapatkan predikat B sama dengan tahun 2021 dengan jumlah poin yang sama yaitu 60 poin. Ini artinya tidak ada peningkatan terhadap kinerja akuntabilitas OPD Kota Pekanbaru.

Masalah terkait akuntabilitas kinerja pada OPD Kota Pekanbaru adalah nilai SAKIP Kota Pekanbaru pada tahun 2022 yang tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 nilai SAKIP hanya sebesar 60% dengan predikat B. Nilai ini sama dengan nilai yang diperoleh pada tahun 2021. Hasil ini belum sesuai dengan target Walikota Pekanbaru yang menargetkan nilai SAKIP tahun 2022 pada predikat A. Berdasarkan teori menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja yaitu kejelasan sasaran anggaran, perencanaan anggaran, dan sistem pelaporan (Saprudin, 2019).

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Mardiasmo, 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh Precelina & Wuryani (2019) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisa & Haryanto (2022) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Perencanaan anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan organisasi, yang dinyatakan dalam satuan keuangan

(unit moneter), dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang (Wisdaningrum, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Sarmin (2019) menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tanjung (2017) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Sistem pelaporan merupakan suatu sistem yang dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan dan menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran), yang mana sistem pelaporan digunakan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban (Precelina & Wuryani, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Precelina & Wuryani (2019) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mikoshi (2020) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kota Pekanbaru. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2024. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pada OPD Kota Pekanbaru yang berjumlah 1.354 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 47 responden. Sumber data berupa sumber data primer dari kuesioner dan sumber data sekunder dari buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan akuntabilitas kinerja sebagai variabel dependen dan tiga variabel independen kejelasan sasaran anggaran, perencanaan anggaran, dan sistem pelaporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu kejelasan sasaran anggaran (X_1), perencanaan anggaran (X_2), sistem pelaporan (X_3), dan akuntabilitas kinerja (Y) disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1)	47	11	29	21.40	5.012
Perencanaan Anggaran (X_2)	47	26	54	41.83	6.920
Sistem Pelaporan (X_3)	47	11	29	19.91	5.675
Akuntabilitas Kinerja (Y)	47	24	57	43.15	7.431

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel hasil SPSS di atas memperlihatkan deskripsi variabel-variabel dalam penelitian ini secara statistik. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai *mean* 21,40 > standar deviasi 5,012, ini artinya data variabel kejelasan sasaran anggaran bersifat homogen (kurang bervariasi) Hal ini juga menunjukkan semakin akurat rata-ratanya. Sehingga mengindikasikan hasil yang cukup baik. Variabel perencanaan anggaran memiliki nilai *mean* 41,83 > standar deviasi 6,920, ini artinya data variabel perencanaan anggaran bersifat homogen (kurang bervariasi) Hal ini juga menunjukkan semakin akurat rata-ratanya. Sehingga mengindikasikan hasil yang cukup baik. Variabel sistem pelaporan memiliki nilai *mean* 19,91 > standar deviasi 5,675, ini artinya data variabel sistem pelaporan bersifat homogen (kurang bervariasi) Hal ini juga menunjukkan semakin akurat rata-ratanya. Sehingga mengindikasikan hasil yang cukup baik. Variabel akuntabilitas kinerja memiliki nilai *mean* 43,15 > standar deviasi 7,431, ini artinya data variabel akuntabilitas kinerja bersifat homogen (kurang bervariasi) Hal ini juga menunjukkan semakin akurat rata-ratanya. Sehingga mengindikasikan hasil yang cukup baik.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasi masing-masing butir pernyataan dengan pedoman jika hasil perhitungan $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ maka pernyataan (kuesioner) tersebut valid atau sahih. Nilai r_{hitung} bisa dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* sedangkan nilai r_{tabel} pada tingkatan signifikan alpha 5% yaitu sebesar $df = n-2$, $df = 47-2$, $df = 45$ dan $\alpha = 0,05$ didapat nilai r_{tabel} sebesar 0,288. Berikut adalah tabel pengujian validitas.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1)				
No.	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	X1.1	0,553	0,288	Valid
2	X1.2	0,727	0,288	Valid
3	X1.3	0,852	0,288	Valid
4	X1.4	0,724	0,288	Valid
5	X1.5	0,780	0,288	Valid
6	X1.6	0,793	0,288	Valid
Perencanaan Anggaran (X_2)				
No.	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	X2.1	0,358	0,288	Valid
2	X2.2	0,436	0,288	Valid
3	X2.3	0,637	0,288	Valid
4	X2.4	0,657	0,288	Valid
5	X2.5	0,575	0,288	Valid
6	X2.6	0,663	0,288	Valid
7	X2.7	0,605	0,288	Valid
8	X2.8	0,676	0,288	Valid

9	X2.9	0,641	0,288	Valid
10	X2.10	0,798	0,288	Valid
11	X2.11	0,605	0,288	Valid
12	X2.12	0,700	0,288	Valid
Sistem Pelaporan (X₃)				
No.	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1	X3.1	0,832	0,288	Valid
2	X3.2	0,728	0,288	Valid
3	X3.3	0,748	0,288	Valid
4	X3.4	0,727	0,288	Valid
5	X3.5	0,585	0,288	Valid
6	X3.6	0,713	0,288	Valid
Akuntabilitas Kinerja (Y)				
No.	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Y.1	0,637	0,288	Valid
2	Y.2	0,625	0,288	Valid
3	Y.3	0,692	0,288	Valid
4	Y.4	0,618	0,288	Valid
5	Y.5	0,649	0,288	Valid
6	Y.6	0,586	0,288	Valid
7	Y.7	0,389	0,288	Valid
8	Y.8	0,358	0,288	Valid
9	Y.9	0,364	0,288	Valid
10	Y.10	0,316	0,288	Valid
11	Y.11	0,313	0,288	Valid
12	Y.12	0,450	0,288	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa masing-masing item pernyataan valid, hal ini dapat diidentifikasi dari nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka data tersebut valid. Dengan demikian item pernyataan yang digunakan dinyatakan valid dan bisa digunakan.

Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas dapat diartikan sebagai kehandalan atau dapat dipercaya. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut ini.

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Nilai Kritis	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₁)	0,903	0,60	Reliabel
Perencanaan Anggaran (X ₂)	0,893	0,60	Reliabel
Sistem Pelaporan (X ₃)	0,896	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja (Y)	0,833	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien *alpha cronbach* semua variabel (variabel x dan y) memiliki nilai $> 0,60$. Maka semua pernyataan variabel sudah valid dan reliabel dan seluruh butir pernyataan pada semua variabel dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov dapat dilihat pada Tabel 4.15 di bawah ini.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized	
	Residual	
N		47
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.	3.99940000
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.063
	Negative	-.112
Test Statistic		.112
Asymp. Sig. (2-tailed)		.182 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan uji *Kolmogorov Smirnov* di atas diketahui nilai *P value (Asymp.Sig)* sebesar $0,182 > 0,05$. Artinya adalah model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	.440	2.274	
Perencanaan Anggaran (X2)	.422	2.367	
Sistem Pelaporan (X3)	.485	2.063	

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja (Y)

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10 untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance* > 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Adapun uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*. Hasil uji dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Sig.
1	(Constant)	.065
	Kejelasan Sasaran	.685
	Anggaran (X1)	
	Perencanaan Anggaran (X2)	.878
	Sistem Pelaporan (X3)	.844

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel 7 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan melihat nilai signifikansi. Terlihat bahwa nilai signifikansi tidak ada yang lebih kecil dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas antara variabel independen dalam model regresi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yakni kejelasan sasaran anggaran, perencanaan anggaran, dan sistem pelaporan terhadap variabel dependen yakni akuntabilitas kinerja. Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$. Berdasarkan hasil perhitungan dengan Program SPSS for Windows versi 24.0 diperoleh koefisien-koefisien pada persamaan Regresi Linear Berganda sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	11.649	3.766		3.093	.003
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	.409	.184	.276	2.231	.031

Perencanaan Anggaran (X2)	.294	.136	.274	2.170	.036
Sistem Pelaporan (X3)	.524	.154	.400	3.392	.001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja (Y)

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda dalam analisis ini adalah : $Y = 11,649 + 0,409 X_1 + 0,294 X_2 + 0,524 X_3$. Arti persamaan regresi linear tersebut adalah :

- 1 Nilai $a = 11,649$ menunjukkan bahwa apabila nilai kejelasan sasaran anggaran (X_1), perencanaan anggaran (X_2) dan sistem pelaporan (X_3) konstan atau tetap maka akuntabilitas kinerja (Y) akan tetap sebesar 11,649.
- 2 Nilai $b_1 = 0,409$ menunjukkan bahwa apabila nilai variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) naik 1 satuan maka akuntabilitas kinerja (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,409 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.
- 3 Nilai $b_2 = 0,294$ menunjukkan bahwa apabila nilai variabel perencanaan anggaran (X_2) naik 1 satuan maka akuntabilitas kinerja (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,294 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.
- 4 Nilai $b_3 = 0,524$ menunjukkan bahwa apabila nilai variabel sistem pelaporan (X_3) naik 1 satuan maka akuntabilitas kinerja (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,524 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.

Hasil Uji Kelayakan Model

Hasil Uji F

Berikut disajikan tabel analisis Uji F.

Tabel 9. Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1804.178	3	601.393	35.146	.000 ^b
	Residual	735.779	43	17.111		
	Total	2539.957	46			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja (Y)

b. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan (X3), Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Perencanaan Anggaran (X2)

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa $F_{\text{hitung}} = 35,146 > F_{\text{tabel}} = 2,82$ artinya hal ini menyebabkan H_0 ditolak, Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi dinyatakan layak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.843 ^a	.710	.690	4.137

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan (X3), Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Perencanaan Anggaran (X2)

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja (Y)

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,710, artinya hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran (X_1), perencanaan anggaran (X_2) dan sistem pelaporan (X_3) secara bersama-sama memberikan sumbangan terhadap akuntabilitas kinerja (Y) sebesar 71%, dan sisanya (29%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Hasil uji parsial (t) atas variabel bebas tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 11. Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error				
1 (Constant)	11.649	3.766			3.093	.003
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	.409	.184		.276	2.231	.031
Perencanaan Anggaran (X2)	.294	.136		.274	2.170	.036
Sistem Pelaporan (X3)	.524	.154		.400	3.392	.001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja (Y)

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berikut ini dapat diuraikan mengenai hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini :

1. Variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja (Y). Hal ini dapat dilihat berdasarkan data pada nilai thitung (2,231) > ttabel (2,017) atau signifikansi (0,031) < 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai kejelasan sasaran anggaran maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

2. Variabel perencanaan anggaran (X_2) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja (Y). Hal ini dapat dilihat berdasarkan data pada nilai thitung ($2,170 > t_{tabel} (2,017)$) atau signifikansi ($0,036 < 0,05$). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai perencanaan anggaran maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
3. Variabel sistem pelaporan (X_3) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja (Y). Hal ini dapat dilihat berdasarkan data pada nilai thitung ($3,392 > t_{tabel} (2,017)$) atau signifikansi ($0,001 < 0,05$). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi nilai sistem pelaporan maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Pembahasan

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y)

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai thitung ($2,231 > t_{tabel} (2,017)$) atau signifikansi ($0,031 < 0,05$). Artinya bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Ini menunjukkan tinggi rendahnya nilai akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru bergantung pada kejelasan sasaran anggaran. Hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja yaitu bahwa kejelasan sasaran anggaran mencerminkan sejauh mana sasaran anggaran dinyatakan secara spesifik, jelas, dan dapat dipahami oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mencapainya. Sasaran yang tidak jelas atau membingungkan dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian para pelaksana, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi. Namun sebaliknya, jika kejelasan sasaran anggaran dinyatakan secara jelas maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat (Fathia, 2017).

Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan atau tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh pegawai. Apabila pegawai berkomitmen untuk mencapai tujuannya, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan konsekuensi kinerjanya. Oleh karena itu maka semakin tinggi sasaran anggaran yang dicapai maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja yang dapat dicapai (Precelina & Wuryani, 2019). Selain kejelasan sasaran anggaran ada juga yang membantu terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu sistem pelaporan. Sistem pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan. Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh karena itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab melaksanakannya. Kejelasan sasaran akan membantu pegawai

untuk mencapai kinerja yang diharapkan, di mana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai (Fathia, 2017).

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti (Mardiasmo, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Precelina & Wuryani (2019) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Pengaruh Perencanaan Anggaran (X_2) Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y)

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran memiliki nilai hitung $(2,170) > t\text{tabel} (2,017)$ atau signifikansi $(0,036) < 0,05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Ini menunjukkan tinggi rendahnya nilai akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru bergantung pada perencanaan anggaran. Hubungan perencanaan anggaran dengan akuntabilitas kinerja adalah perencanaan anggaran merupakan kegiatan yang paling penting dalam pengelolaan keuangan negara karena berkaitan dengan akuntabilitas kepada publik. Oleh karena itu, penting untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Salah satu caranya yaitu dengan adanya perencanaan anggaran yang baik. Perencanaan anggaran mencakup penyusunan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya rancangan APBD (Agustin, 2019).

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD maka dibutuhkan perencanaan anggaran yang baik. Semakin baik kualitas perencanaan anggaran maka kecenderungan semakin baik tingkat akuntabilitas kinerja. Proses penetapan tujuan dapat mempengaruhi kinerja setiap individu yang dituntut mencapai tujuannya. Apabila suatu tujuan telah dirancang, maka individu yang terlibat dalam penetapan tujuan akan memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran merupakan faktor determinan akuntabilitas kinerja (Nadianti & Rosidi, 2019).

Anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Proses penyusunan maupun pengesahan anggaran dapat dipublikasikan ke masyarakat. Tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen dan instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil dari persetujuan politik, termasuk item pengeluaran yang harus disetujui oleh para legislator. Sehingga jelas bahwa perencanaan anggaran organisasi/ pemerintah yang baik akan meningkatkan akuntabilitas organisasi/pemerintah (Bastian, 2015).

Proses perencanaan adalah salah satu tahap penting dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan dan penganggaran yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya akan menimbulkan hambatan bagi perangkat

daerah. Akibat dari perencanaan dan penganggaran yang kurang baik, menyebabkan penyerapan anggaran yang tidak maksimal, keduanya akan berdampak pada kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, ketepatan dalam menyusun, merencanakan dan melaksanakan anggaran belanja diperlukan untuk mendukung program-program Kepala Daerah dalam mencapai visi dan misinya (Fadhilatunnisa, Suwondo, & Novianty, 2021).

Aspek perencanaan yang kurang matang mengakibatkan sulitnya pelaksanaan anggaran yang berdampak pada lambatnya proses penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, penentuan anggaran yang ditetapkan akan berdampak pada pelaksanaan program kerja yang tidak mampu dijalankan dengan baik, dikarenakan perencanaan anggaran tidak selaras dengan program kerja yang ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarmin (2019) menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

Pengaruh Sistem Pelaporan (X_2) Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y)

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan memiliki nilai thitung $(3,392) > t$ tabel $(2,017)$ atau signifikansi $(0,001) < 0,05$. Artinya bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Ini menunjukkan tinggi rendahnya nilai akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru bergantung pada sistem pelaporan. Hubungan sistem pelaporan dengan akuntabilitas kinerja adalah sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Fathia, 2017).

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem pelaporan yang baik yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil pemerintah daerah pada suatu periode (Mardiasmo, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Precelina & Wuryani (2019) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Artinya kejelasan sasaran anggaran yang baik dari OPD Kota Pekanbaru akan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Artinya perencanaan anggaran yang tinggi dari OPD Kota Pekanbaru misalnya ketepatan data dalam penyusunan

perencanaan anggaran di instansi sangat tinggi serta sesuai dengan prioritas kebutuhan maka akan semakin membuat akuntabilitas kinerja OPD Kota Pekanbaru semakin baik. Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Artinya ketika sistem pelaporan yang dilakukan telah optimal dan berjalan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau. *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(2), 109–118.
- Anisa, I. N., & Haryanto. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(1), 77–85.
- Bastian, I. (2015). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadhilatunnisa, A., Suwondo, S., & Novianty, I. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 577–586.
- Fathia, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Kasus SKPD di Prov. JOM Fekon, 4(1), 670–685.
- Jogjaprov.go.id. (2022). DIY kembali Meraih SAKIP Predikat AA, Tertinggi di Indonesia sejak 2018. Retrieved from <https://jogjaprov.go.id/berita/diy-kembali-meraih-sakip-predikat-AA-tertinggi-di-indonesia-sejak-2018>
- Kementerian PANRB. (2022). Beri Penghargaan Instansi Pemerintah Berprestasi, Kementerian PANRB: Kerja Birokrasi Harus Berdampak. Retrieved from <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/beri-penghargaan-instansi-pemerintah-berprestasi-kementerian-panrb-kerja-birokrasi-harus-berdampak>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mikoshi, M. S. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 1–11.
- Nadianti, R., & Rosidi. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(1), 1–26.
- Precelina, D. D., & Wuryani, E. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 7(3), 1–10.
- Rusdiana, A., & Nasihudin, N. (2021). *Akuntabilitas: Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD.
- Saprudin. (2019). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem

- Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal EBBANK*, 10(1), 57–68.
- Sarmin, N. F. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Studi Kasus Pada SPKD Kab. Majene. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1(1), 1-13.
- Tanjung, I. F. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, Dan Evaluasi Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada SKPD Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah UNJ*, 1(1), 21-34.
- Wisdaningrum, O. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Pengukuran Anggaran, Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1-10.